



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024**

BERLIAN

BERSAMA LINDUNGI ANAK

UPTD PPA

UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

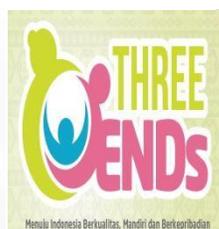
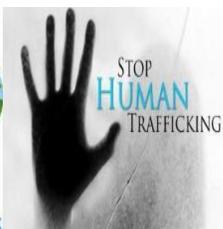
PUSPAGA

PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA

PATBM

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU

BERBASIS MASYARAKAT



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2024

Skema Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis menjadi acuan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, Pada tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Dalam dokumen Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2024 ini selain memuat Program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, juga Visi Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa tugas dan fungsi serta memuat program/kegiatan capaian kinerja dan evaluasi Rencana Kerja tahun 2024.

Harapan kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa dapat berfungsi maksimal dalam pelayanan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh Stakeholders.

Tondano, Oktober 2024

 KEPALA DINAS

AGUSTIFO J.E TUMUNDO SE, MS.i
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700814 199702 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama dalam rangka pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa berupaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang terkoordinasi, terintegrasi baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja-SKPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan Renstra SKPD 5 Tahun berdasarkan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Tahun 2024 mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2023

Adapun pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2017, Dokumen Metadata Indikator, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan SDGs tentang Kesetaraan Gender menyebutkan 5 (Lima) hal yang akan dicapai :

1. Mengakhiri semua bentuk deskriminasi terhadap semua dan anak perempuan di mana-mana.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, terhadap perdagangan dan seksual dan jenis-jenis eksploitasi lainnya.
3. Hilangkan semua praktek-praktek berbahaya terhadap anak, pernikahan dini, pernikahan paksa dan mutilasi alat kelamin perempuan.
4. Kenali dan nilai dibayar perawatan dan pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan promosi, tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 -2028;
17. Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa;

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa adalah untuk memberikan kejelasan langkah- langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi dan menghadapi tantangan internal dan eksternal sekaligus sebagai alat pengukur dalam menilai kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa yaitu memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Minahasa tahunan dalam waktu lima tahun. Dan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Melalui alokasi APBD Tahun Anggaran 2024 dan dukungan sumber daya yang ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa, maka hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa tahun 2023 terkait pencapaian target Renstra perangkat daerah adalah sebagai berikut :

<i>1. Terwujudnya kelancaran operasional dan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien</i>				
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	
			<i>Hasil</i>	<i>%</i>
Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Tahun	1	1	100
Tersedianya Jasa Sopir	Tahun	1	1	100
Tersedianya Jasa tenaga administrasi ktr	Tahun	1	1	100
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Tahun	1	1	100
Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tahun	1	1	100
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tahun	1	1	100
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun	1	1	100
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	1	100
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Set	1	1	100
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Tahun	1	1	100
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Tahun	1	1	100

<i>2. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kantor</i>				
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	
			<i>Hasil</i>	<i>%</i>
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor lainnya	Unit	13	13	100
Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya BBM untuk kendaraan dinas/operasional	Tahun	1	1	100

<i>3. Meningkatnya disiplin aparatur</i>				
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	
			<i>Hasil</i>	<i>%</i>
Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu/batik	Pasang	25	25	100
Pakaian Olahraga	Pasang	25	-	-

<i>4. Meningkatnya keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</i>				
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	
			<i>Hasil</i>	<i>%</i>
Terlaksananya Sosialisasi tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	Orang	600	480	80

<i>5. Meningkatnya penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>				
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	
			<i>Hasil</i>	<i>%</i>
Terlaksananya pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Orang	200	200	100
Terlaksananya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Orang	200	200	100

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diikuti oleh masyarakat di Kabupaten Minahasa.

<i>6. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</i>				
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	
			<i>Hasil</i>	<i>%</i>
Terlaksananya rehabilitasi gedung P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Unit	1	1	100
Tersedianya Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)	Unit	1	1	100

Sasaran tersebut di atas telah mencapai indikator kinerja sesuai yang diharapkan sehingga memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan kantor.

<i>7. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak</i>				
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Satuan</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	
			<i>Hasil</i>	<i>%</i>
Terlaksananya Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Orang	200	200	100

Untuk Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

1. *Belanja Tidak Langsung*

<i>No</i>	<i>KEGIATAN</i>	<i>ANGGARAN</i>	<i>REALIASASI</i>	
			<i>Anggaran</i>	<i>%</i>
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,107,419,490		
2	Tunjangan Keluarga	96,683,629		
	Tunjangan Jabatan PNS	214.270.000		
3	Tunjangan Fungsional Umum	750.000		
4	Tunjangan Beras	49.770.645		
5	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	20,336,744		
6	Pembulatan Gaji	13,313		
7	Iuran JKK	62,138,281		
8	Iuran JKM	2,275,586		
19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6,826,799		
10	Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya	858,424,750		
Jumlah		2.418.909.237		

2. *Belanja Langsung*

<i>No.</i>	<i>KEGIATAN</i>	<i>ANGGARAN</i>	<i>REALIASI</i>	
			<i>Anggaran</i>	<i>%</i>
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19,998,700		
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000		
3	Penyediaan jasa internet	6,180,000		
4	Penyediaan Air	1,225,000		
5	Penyediaan Listrik	2,745,500		
6	Penyediaan Jasa Sopir	33.600.000		
7	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	144.000.000		
8	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000		
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	38.480.000		

10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,999,750		
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,025,000		
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,975,000		
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,638,000		
14	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	87,494,450		
15	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	255,999,050		
16	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	49,965,000		
17	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14,175,000		
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	405,999,70		
19	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	87,494,450		
20	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	28,430,000		
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	174,990,000		
22	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24,894,000		
23	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	143,898,900		
	JUMLAH	827.800.000		

Dari target anggaran dari setiap sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa, realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Namun pencapaian realisasi anggaran yang tidak 100% tersebut, bukan berarti capaian kinerja kegiatan dimaksud tidak mencapai target secara keseluruhan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak maka telah dirumuskan indikator utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua Aspek pembangunan	✓ Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan	<i>Jumlah Kursi DPRD/Jumlah Caleg Perempuan</i>
		✓ Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	<i>(jln perempuan dilembaga pemerintah/jumlahpekerja)</i>
		✓ Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	<i>(pekerja perempuan dilembaga swasta/jumlah pekerja perempuan x 100)</i>
		✓ Jumlah peraturan/sosialisasi terkait kesetaraan dan keadilan gender serta kualitas perempuan dan anak	<i>Jumlah Perda dan Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan per tahun</i>

2	Terwujudnya kelompok usaha perempuan (<i>woman local entrepreneur</i>)	✓ Jumlah calon wirausaha baru perempuan yang dilatih	<i>Jumlah Kelompok perempuan yang dilatih</i>
3	Terciptanya Kompetensi dan peran perempuan disegala aras	✓ Tenaga kerja perempuan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	<i>Jumlah Tenaga kerja perempuan</i>
4	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuandan Perlindungan serta Pemenuhan hak-hak anak Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan	✓ Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	<i>(pekerja anak usia 5-14 tahun/jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100)%</i>
		✓ Ratio KDRT	<i>Rumus : Jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1000 RT</i>
		✓ Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	<i>Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu ----- x 100 %</i> <i>Jumlah Pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu</i>
			<i>Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduanb di unit pelayanan terpadu ----- x 100 %</i> <i>Jumlah petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu</i>
		✓ Cakupan Perempuan dan Anak korban yang mendapatkan layanan bantuan hokum	<i>Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum ----- x 100 %</i> <i>Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum</i>
✓ Jumlah Lembaga Peduli Perempuan dan Anak	<i>Jumlah Lembaga Peduli Perempuan dan Anak yang terfasilitasi</i>		
5	Terlaksananya peningkatan kualitas perempuan dan anak	✓ IPG ; Indeks Pembangunan Gender	<i>(untuk mengukur dan mengungkapkan ketimpangan/kesenjangan antara laki dan perempuan</i>
		✓ IDG : Indeks Pemberdayaan Gender	<i>Untuk mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan <u>ekonomi</u> dan <u>politik</u> dalam pengambilan keputusan. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan</i>

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa adalah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi program-program pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sehingga memiliki peranan dalam rangka membuka sudut pandang para stakeholder mengenai prespektif gender dan anak serta mensosialisasikan pola pikir strategis dimana perempuan dan anak dapat dijadikan sebagai asset dan potensi penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk perempuan dan usia anak mencapai lebih dari separuh jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa. Potensi yang besar itu menjadi alasan bahwa urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan kualitas perempuan dan anak menjadi agenda penting pembangunan. Kualitas dan kapasitas perempuan di Kabupaten Minahasa perlu ditingkatkan. Dengan potensi daerah dan sumberdaya manusia yang besar menjadi pemicu untuk dapat mengembangkan daya saing yang positif bagi pembangunan di Kabupaten Minahasa secara makro.

Berbagai indikator capaian keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara nasional menjadi indikator acuan keberhasilan pembangunan daerah adalah :

<i>No</i>	<i>DATA CAPAIAN INDIKATOR</i>	<i>PENYEDIA DATA</i>
1.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	BPS
	Angka Harapan Hidup	
	Angka Melek Huruf	
	Rata-rata Lama Bersekolah	
	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	
2.	IDG (Indeks Pengembangan Gender)	BPS
	Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	
	Angka Partisipasi perempuan sebagai tenaga manager, professional dan administrasi	
	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	
3.	Capaian SPM Bid.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3A P2TP2A
	Cakupan Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Dinsos
	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	PN, Kejaksaan & UPPA
	Cakupan Layanan Bantuan Hukum	
	Cakupan Layanan Kesehatan	
	Cakupan Reintegrasi Sosial	
4.	Indikator Kinerja Kunci	Kemendagri & KPPPA
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	
	Angka Melek Huruf perempuan usia 15 ke atas	
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	
5.	Indikator Kinerja Utama	KP3A
	Jumlah peserta/kelompok yang mendapatkan pelatihan/pembekalan/sosialisasi dibandingkan jumlah peserta/kelompok sasaran	
	Jumlah lembaga yang mengikuti penguatan kapasitas	
	Jumlah indikator pemenuhan hak anak yang dapat dicapai	

Berkaitan dengan hal tersebut maka penyediaan data atas capaian indikator diatas dipengaruhi oleh ketepatan dan komunikasi lintas sektor untuk merekam dan melaporkan perkembangan data tiap tahun dapat diinventarisir sebagai dasar perumusan kebijakan dan mengatasi berbagai isu-isu dan permasalahan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Beberapa isu dan analisa yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender

- Perlunya penguatan peran, kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan lembaga lembaga penggiat dan pemerhati perempuan dan anak
- Perlunya penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas SKPD dan Focal Group Discussion.
- Perlunya fasilitasi penyusunan, perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan SKPD.
- Perlunya penyediaan data terkait perkembangan PUG, PP dan PA termasuk penyusunan profil data terpilah gender dan anak.
- Perlunya pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Perlunya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

- Perlunya penanganan/fasilitasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan melalui pusat pelayanan terpadu.
- Perlunya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dengan instansi dan lembaga layanan.
- Perlunya penyediaan data terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- Perlunya pelaksanaan kebijakan/program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pengarusutamaan dan pemenuhan hak anak.
- Perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor/lintas SKPD dalam rangka kebijakan Kabupaten Layak Anak.
- Perlunya evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas urusan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Haknya

- Perlunya peningkatan kualitas hidup perempuan yang termasuk kelompok rentan melalui sosialisasi, bimbingan, keterampilan dan berbagai upaya pemberdayaan.
- Perlunya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan capaian tingkat keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan perempuan secara makro.

- Perlunya peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan.
- Perlunya program perempuan pengembang ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Perlunya program peningkatan peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
- Perlunya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan Pemberdayaan Perempuan

4. Perlindungan Anak dan Pemenuhan Haknya

- Perlunya peningkatan kualitas hidup anak melalui fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak
- Perlunya penguatan Forum anak/kelompok anak di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- Perlunya pengembangan Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- Perlunya sinkronisasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah
- Perlunya penguatan Pokja Kabupaten Minahasa Tenggara Layak Anak.
- Perlunya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak.

Tabel 2.4

Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dalam melaksanakan kegiatan kendala yang ditemui dilapangan adalah tidak adanya ketersediaan dana penunjang, tapi ditahun 2021 sekalipun tidak ada anggaran tapi dpppa bisa mendapatkan penghargaan APE	Diharapkan ketersediaan anggaran untuk menunjang program kegiatan
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Tidak ada anggaran penunjang dalam pelaksanaan pendampingan korban dan tidak adanya dana untuk melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak	Kegiatan pendampingan terhadap korban tetap berjalan walaupun tidak dengan anggaran diharapkan tahun kedepan tersedia anggaran untuk pendampingan dan sosialisasi
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-Belum tersedia Perda Perlindungan Perempuan -Tidak tersedia dana untuk sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tidak tersedianya anggaran untuk pemulangan perempuan korban TPPO	Diharapkan ketersediaan anggaran untuk menunjang program kegiatan
4	Persentase peran perempuan dalam pembangunan diberbagai bidang	Kegiatan yang menunjang peran perempuan dalam pembangunan tidak terlaksana karena tidak tersedia anggaran	Diharapkan ketersediaan anggaran untuk menunjang program kegiatan

5	Persentase angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Tidak ada anggaran penunjang dalam pelaksanaan pendampingan korban dan tidak adanya dana untuk melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak	Kegiatan pendampingan terhadap korban tetap berjalan walaupun tidak dengan anggaran diharapkan tahun kedepan tersedia anggaran untuk pendampingan dan sosialisasi
6	Jumlah kebijakan (Perda/ Perbup) dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan yang diterbitkan	Dalam melaksanakan kegiatan kendala yang ditemui dilapangan adalah tidak adanya ketersediaan dana penunjang, tapi ditahun 2022 sekalipun tidak ada anggaran tapi dpppa bisa mendapatkan penghargaan KLA	Diharapkan ketersediaan anggaran untuk menunjang program kegiatan
7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Keterkaitan dengan BKPSDM	Koordinasi
8	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Keterkaitan dengan DPRD	Koordinasi
9	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Keterkaitan dengan Tenaga Kerja	Koordinasi
10	Rasio KDRT	Tidak ada anggaran penunjang dalam pelaksanaan pendampingan korban dan tidak adanya dana untuk melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak	Kegiatan pendampingan terhadap korban tetap berjalan walaupun tidak dengan anggaran diharapkan tahun kedepan tersedia anggaran untuk pendampingan dan sosialisasi

11	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Tidak ada anggaran penunjang dalam pelaksanaan pendampingan korban dan tidak adanya dana untuk melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak	Kegiatan pendampingan terhadap korban tetap berjalan walaupun tidak dengan anggaran diharapkan tahun kedepan tersedia anggaran untuk pendampingan dan sosialisasi
12	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Keterkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja	Koordinasi
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Keterkaitan dengan Dinas Sosial Catatan: Sesuai tupoksi DPPPA, program/kegiatan dinas adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan disaat kasus korban sementara berjalan dan untuk rehabilitasi adalah kewenangan DINSOS	Kegiatan pendampingan terhadap korban tetap berjalan walaupun tidak dengan anggaran diharapkan tahun kedepan tersedia anggaran untuk pendampingan dan sosialisasi
14	Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		

Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Rancangan awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

TABEL I
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MINAHASA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPA Kab.Min	Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan & Pegawai terhadap pelayanan administrasi & tugas teknis kantor			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPA Kab. Minahasa	Tingkat kepuasan pihak yang berkepentingan & Pegawai terhadap pelayanan administrasi & tugas teknis kantor	100 %	2,418,909,237	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Presentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Presentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi	100 %		
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah pegawai dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan			Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah pegawai dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan	90% 90%	19.998.700 2.999.750 7,975,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90%		
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Presentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	95%		38.480.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100%	34.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPPA Kab. Minahasa		100%	201,600,000	
6.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95%	5.025.000	
1.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPPA Kab. Minahasa	jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	95%	87,494,450	
1.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Penvediaan Lavanan bagi Anak vana Memerlukan Perlindungan Khusus vana Memerlukan Koordinasi Tinakat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DPPPA Kab. Minahasa	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			

2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	95%	24,894,000
	Penguatan dan Penguasaan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	95%	143,898,900

	<p>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p> <p>1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p>		<p>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>			<p>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p>		<p>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>95%</p>	<p>87,494,450</p>
<p>2.</p>	<p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</p>			<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</p>	<p>95%</p>	<p>255,999,050</p>
	<p>Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota</p>			<p>Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota</p>	<p>95%</p>	<p>49,965,000</p>

1.	<p>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	95%	14,175,000
2.	<p>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>		<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	95%	405,999,700
1.	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</p> <p>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</p> <p>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</p>	<p>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan</p>		<p>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</p>	<p>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat</p>	95%	28,430,000
						95%	174,990,000

	Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
--	---------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

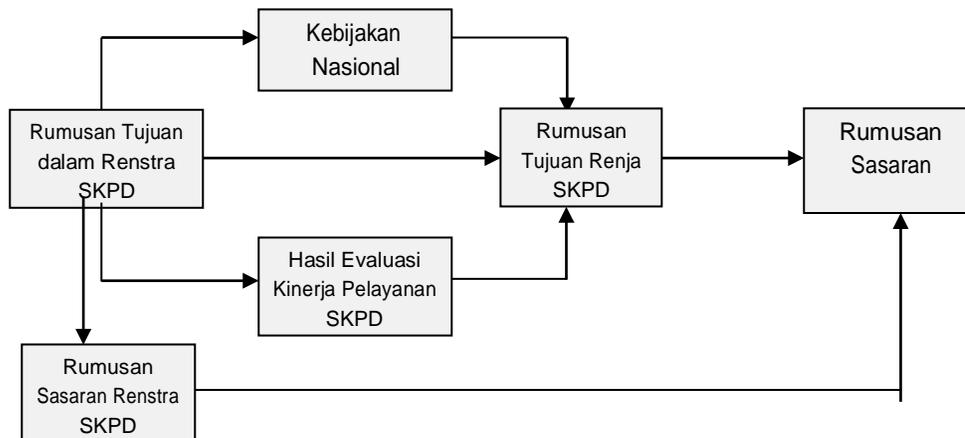
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Terfasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan Korban Trafficking serta Meningkatnya Jumlah Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	1,000.000.000	
	Pembangunan Gedung Rumah Aman/ P2TP2A di Kabupaten	Kab			
	Penyediaan Kendaraan Penanganan Korban kekerasan (Mobil Perlindungan Anak dan Perempuan)	Kab			
	Penyediaan Gedung Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kab			
	Penyediaan Ruang Publik Yang Ramah anak dan Perempuan	Kab			
	Pembangunan Gedung UPTD PPA	Kab			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.1 Skema Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Skpd Kabupaten



Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu kebijakan pengarusutamaan pembangunan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender kedalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam arahan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 telah ditetapkan **Visi**

Visi Kemen PPPA mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Kemen PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2014–2019 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja tersebut, Kementerian PPPA sebagai salah satu dari Kabinet Kerja yang memberikan kontribusi strategis untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pertama, mewujudkan Indonesia yang berdaulat dengan tekad dan komitmen para penentu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat, melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak guna mempercepat peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Kemen PPPA akan berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat melalui peningkatan kualitas kemampuan bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa diskriminasi dan atau kekerasan dengan semangat gotong royong.

Kedua, kemandirian suatu bangsa merupakan keniscayaan sehingga segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan secara sendiri. Pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender. Kemen PPPA berkontribusi mewujudkan kemandirian suatu bangsa melalui ketersediaan sumber daya manusia baik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri sebagai identitas bangsanya. Hal ini bisa diwujudkan oleh Pemerintah bersama masyarakat dalam mengelola nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Kemen PPPA senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan bersama K/L dan Pemda dalam rangka mengakselerasikan pembangunan bangsa yang berkepribadian dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan semangat gotong royong.

Misi Kemen PPPA mengacu pada Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakkan segala potensi dan sumberdaya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Misi Kemen PPPA Tahun 2015-2019 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Kerja:

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum

Pembangunan SDM harus dilaksanakan secara berkualitas untuk mencapai kemajuan yang berkeimbangan antara laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan secara inklusif mulai dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kemen PPPA berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak melalui penyusunan kebijakan/program yang memperhatikan keleluasan akses pendidikan yang tinggi, menguasai ketrampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), yang berdampak positif untuk menciptakan masyarakat beradab dan saling menghargai tanpa diskriminasi khususnya kepada perempuan dan anak.

2. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

Perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki secara inklusif harus diberi kemudahan untuk memperoleh akses dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang pada gilirannya dapat membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas, tercegahnya tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

Bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berkualitas akan berdampak pada produksi barang dan jasanya yang berkualitas. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi dalam tersedianya kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang tinggi, sehingga bangsa Indonesia memiliki daya saing tinggi pada tingkat nasional, regional dan global.

4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Peningkatan kualitas hidup manusia yang berdaya saing tidak lepas dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemen PPPA dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi bersama K/L dan Pemda dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Tujuan; Rumusan Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
3.	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak
4.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak
5.	Persentase hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti
6.	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PP-PA

Sasaran Strategis

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing:

Tujuan 1: Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya persentase kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah;

Tujuan 2: Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan TPPO yang ditandai dengan:

- b. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan;
- c. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan;
- d. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

Tujuan 3: Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah Meningkatkan perlindungan Anak dari tindak kekerasan dan TPPO yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
- c. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.

Tujuan 4: Meningkatnya pemenuhan hak semua anak,

Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategis yaitu: Meningkatkan Implementasi konsep kabupaten layak anak dan perlindungan pada anak, yang ditandai dengan:

- a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
- c. Meningkatnya lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak

Tujuan 5: Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 6: Meningkatnya kualitas keluarga

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tujuan 7: Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah Meningkatnya lembaga masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa terutama (misi ke-1 dan 4) .

V I S I

Minahasa Yang Mandiri dan Sejahtera

MISI

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya si Tou Timou Tumou Tou.
2. Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus.
3. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum.
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan Makmur

Keterkaitan Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa dengan Program/kegiatan Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, terutama (misi ke 1 dan 4)

Program dan kegiatan Tahun 2024

Sebagai penjabaran dari arah dan kebijakan di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka telah ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daaerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program dan kegiatan Teknis Bidang

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan
 - b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATA TAN
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		
2.08.01.2.01	Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disahkan		
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan adm. umum perangkat daerah yang terfasilitasi		
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	
2.08.01.2.08.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang difasilitasi pengadaannya per Jumlah BMD yang direncanakan kali 100%		
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang difasilitasi per jumlah fasilitasi yang harus dilakukan kali 100%		
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	

2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik/ laik fungsi		
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja APBD		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan		
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Cakupan lembaga masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan layanan perlindungan Perempuan		
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban kekerasan yang memperoleh layanan perempuan		

2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	
2.08.06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan		
2.08.06.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase hak anak dan perempuan yang terpenuhi dalam keluarga		
2.08.06.2.01.01	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Jumlah Program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/K		Jumlah kerjasama		
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Jumlah Lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan melalui terfasilitasi upaya pemenuhan hak anak		
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	15 Organisasi	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Presentase anak korban kekerasan yang di tangani Instansi terkait tingkat kabupaten kota		

2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Presentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan		
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian **Visi** dan **Misi** Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa (terutama misi ke-1 dan 4)

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Keterkaitan Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa dengan Program/kegiatan Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Minahasa,

- ✓ Menghadirkan kembali rasa nyaman serta melindungi segenap masyarakat dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat terutama perempuan dan anak
- ✓ Membangun Minahasa dengan memperkuat dan menggali potensi diri perempuan mandiri tanpa meninggalkan kodratnya.
- ✓ Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia terutama perempuan dan anak.
- ✓ Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- ✓ Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
- ✓ Meningkatkan Perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak
- ✓ Memberikan rasa nyaman serta perlindungan kepada lansia

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2024 :

Jumlah Program	:	7
Jumlah Kegiatan	:	14
Pagu Indikatif APBD	:	Rp. 4.053.116.737,-

Rencana Program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa di Tahun 2024 adalah :

Program Pendukung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Utama Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
 - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak
 - b. Temu Kreativitas Anak
4. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak
 - b. Sosialisasi Peraturan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
 - c. Penguatan Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat/PATBM
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perempuan
 - a. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
 - b. Penguatan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan

melalui pemberdayaan ekonomi dan politik.

- c. Sosialisasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak/PUSPA

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI UTARA KABUPATEN MINAHASA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.281.298.845,00		3.491.298.945,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.281.298.845,00		3.491.298.945,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.281.298.845,00		3.491.298.945,00
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.981.298.845,00		3.071.298.945,00
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.000.000,00		5.000.000,00
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.510.811.845,00		2.510.811.845,00
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.510.811.845,00	21 Orang/bulan	2.510.811.845,00

2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		22.307.000,00		28.000.000,00
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	22.307.000,00	21 Paket	28.000.000,00
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		158.000.000,00		163.000.000,00
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.000.000,00	10 Paket	30.000.000,00
2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	1 Paket	2.000.000,00
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	2 Paket	5.000.000,00
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.000.000,00	12 Laporan	16.000.000,00
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		88.000.000,00		107.600.000,00
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	10.000.000,00	4 Unit	17.600.000,00
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	55.000.000,00	5 Unit	60.000.000,00
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.000.000,00	1 Unit	30.000.000,00
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		74.100.000,00		74.100.000,00

					Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		50.000.000,00		60.000.000,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000,00		60.000.000,00
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	50.000.000,00	15 Perangkat Daerah	60.000.000,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		40.000.000,00		60.000.000,00
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		40.000.000,00		60.000.000,00
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		20.000.000,00		40.000.000,00
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		20.000.000,00		40.000.000,00
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		70.000.000,00		100.000.000,00
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		70.000.000,00		100.000.000,00
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				

					Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	15 Organisasi	70.000.000,00	15 Organisasi	100.000.000,00	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		40.000.000,00		50.000.000,00	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		40.000.000,00		50.000.000,00	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	40.000.000,00	15 Perangkat Daerah	50.000.000,00	
TOTAL								3.281.298.845,00		3.491.298.945,00

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa ini disadari masih jauh dari sempurna, masih merupakan identifikasi awal baik issue strategis maupun program dan kegiatan dan akan lebih dipertajam lagi melalui tahapan Forum SKPD dan analisa oleh Tim Penyusunan Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa beserta pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Demikian Perubahan Rencana Kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa tahun 2024, diharapkan Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Oktober 2024


AGUSTIFO J.E TUMUNDO SE, MS.i
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700814 199702 1 001